

AKSES PEREMPUAN SEBAGAI MEDIATOR KONFLIK ANTAR DESA DI KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ritha Safithri¹, Haslinda B. Anriani², A. Maddukelleng³

¹Ritha Safithri / Universitas Tadulako
italapasere@gmail.com

²Haslinda B. Anriani / Universitas Tadulako
haslinda.tadulako@gmail.com

³A. Maddukelleng / Universitas Tadulako
andimaddukelleng7@gmail.com

ABSTRAK

Konflik antar desa merupakan bentuk konflik yang terjadi di masyarakat termasuk di kabupaten Sigi. Penanganan konflik antar masyarakat termasuk konflik antar desa, semestinya perlu keterlibatan semua pihak mulai dari pemerintah, para tokoh masyarakat, pemuka agama serta pelibatan perempuan untuk bisa berperan serta agar bisa memberikan pandangan terhadap warga yang selalu terlibat konflik untuk tidak mudah terprovokasi yang buntutnya akan sangat merugikan masyarakat itu sendiri seperti korban jiwa, korban harta benda. Disadari atau tidak, konflik menghasilkan destruksi total kehidupan, baik terhadap tata kehidupan fisik – lingkungan maupun tatanan kemasyarakatan. Namun dalam kondisi demikian itu, perempuan yang biasanya dianggap lemah, dapat mengambil inisiatif dalam melakukan hal – hal mendasar dan strategis, seperti menjadi penghubung diantara pihak berkonflik, sensitif terhadap realitas kemanusiaan dan memiliki daya tahan. Dalam konteks itu perempuan mempunyai potensi dan peluang untuk membangun perdamaian, untuk merekonstruksi tatanan fisik monumental dan sosio kultural yang dihancurkan melalui konflik yang didominasi struktur maskulin. Pemetaan posisi dan peran perempuan juga dapat dihubungkan dengan konteks fase perkembangan konfliknya, yakni pra konflik, konflik dan post konflik. Setiap fase memiliki tekanan khusus dan akses, posisi dan kontribusi perempuan pada setiap fase konflik akan sangat berkaitan dengan karakter setiap fase tersebut.

Kata Kunci: Konflik; Perempuan; Perdamaian

1. PENDAHULUAN

Makalah ini bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Konflik adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat, dan konflik memberikan dampak tersendiri bagi perempuan. Terjadinya konflik antar masyarakat apalagi konflik dengan kekerasan tentu menimbulkan permasalahan, termasuk juga bagi perempuan. Konflik tidak terjadi begitu saja, ada banyak faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Usaha resolusi konflik telah dilakukan oleh aparat pemerintah, aktivis dan kalangan ilmuwan atau tokoh agama dan tokoh masyarakat, hasilnya masih terbatas dan belum memuaskan. Konflik yang terjadi sering berulang tanpa ada penyelesaian, perbedaan

pandangan, pendapat, dan cara berinteraksi. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan terjadinya perselisihan yang kemudian menjadi penyebab konflik. Dibalik peristiwa solusi konflik tersebut, terdapat tanda tanya besar mengenai peran perempuan dalam resolusi konflik dan membangun perdamaian, sehingga konflik dapat diselesaikan, yang memotivasi untuk mengkaji substansi model resolusi konflik yang diperankan kaum perempuan tersebut.

Kabupaten Sigi merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten ini dibentuk pada tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27/2008. Tipologi konflik yang seringkali terjadi di Kabupaten Sigi adalah konflik antar desa atau antar kampung. Konflik ini sebagian besar hanya disebabkan oleh masalah-masalah yang bersentuhan dengan pemuda, misalnya persaingan atas sesuatu hal, persoalan bersenggolan di jalanan, saling ejek antar anak muda, kalah pertandingan olahraga atau masalah perselisihan anak muda lainnya. Namun demikian konflik antar desa ini tidak bisa hanya dilihat dari pemicu konfliknya saja, pada beberapa desa berkonflik, memiliki sejarah konflik yang panjang dan dapat ditelusuri beragam masalah yang sudah kadung menjadi akar konflik yang sulit dilepaskan dari entitas tersebut. Eskalasi konflik di Kabupaten Sigi cenderung meningkat dan melewati batas-batas rasionalitas. Artinya konflik yang terjadi melibatkan masyarakat yang mempunyai hubungan dan tali kekerabatan serta persaudaraan yang kental. Mereka yang bertikai pada dasarnya mempunyai hubungan persaudaraan baik sepupu, saudara maupun kerabat yang mempunyai ikatan persaudaraan yang kuat. Oleh sebab itu sampai sekarang sulit mencari akar masalah mengapa konflik antar desa/kampung sangat sering terjadi di Kabupaten Sigi.

Konflik antar desa yang seringkali terjadi di kabupaten Sigi, dapat dilihat dari teori konflik menurut Coser bahwa konflik dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan- tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. (2) Konflik Non- Realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak.

2. METODE

Metode yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Wawancara mendalam dan Fokus Group Diskusi dilakukan dengan unsur pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan serta masyarakat umum yang memiliki pengetahuan tentang situasi pluralitas di masyarakat. Pada proses wawancara dan fokus group diskusi, yang dilakukan adalah menggali informasi untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana sumber potensi konflik yang terjadi, bagaimana proses yang dilakukan dalam penyelesaian konflik antar desa tersebut, siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana hasil yang didapatkan dari proses penyelesaian konflik antar desa tersebut. Proses pengumpulan data ini juga menggali nilai budaya dan kearifan lokal yang pernah ada dan masih ada serta dapat dikembangkan untuk menjadi satu strategi dalam penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI

Penelitian ini mengungkapkan bahwa nilai-nilai budaya lokal yang dapat untuk dikembangkan sebagai nilai-nilai yang dapat dipakai pada penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian. Kabupaten Sigi sesungguhnya memiliki kekayaan kearifan lokal

yang terkait dengan mekanisme penyelesaian konflik. Selain model-model penyelesaian konflik yang sudah ada secara teoretis, harus diingat juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki keragaman budaya. Setiap budaya memiliki kearifan-kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk di dalamnya kearifan dalam menyelesaikan konflik. Kearifan-kearifan seperti inilah yang sering disebut sebagai kearifan lokal (*local wisdom*). Menyelesaikan konflik antar desa dapat dengan menggunakan adat lokal atau kearifan lokal karena selama ini sudah membudaya dalam masyarakat. Oleh karena kearifan lokal adalah sesuatu yang sudah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi profan semata, tetapi juga berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat.

Penanganan konflik warga di Kabupaten Sigi, semestinya perlu keterlibatan dan koordinasi sertra kerja sama berbagai pihak, seperti Pemerintah daerah Kabupaten Sigi dan para tokoh masyarakat serta pemuka agama untuk bisa berperan serta agar bisa memberikan pandangan terhadap warga yang selalu terlibat konflik untuk tidak mudah terprovokasi yang buntutnya akan sangat merugikan masyarakat itu sendiri seperti korban jiwa, korban harta benda. Seperti yang banyak terjadi bahwa pada setiap kejadian konflik perempuanlah yang biasanya banyak merasakan dampak buruk sebagai korban konflik.

Hasil diskusi memperoleh bahwa gambaran tentang budaya dan nilai-nilai yang ada dimasyarakat, perempuan mempunyai peluang besar berperan sebagai mediator konflik. Budaya serta kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Sigi, mempunyai peluang untuk dikembangkan kembali dalam kehidupan masyarakat. Berbagai bentuk atau nilai budaya dan kearifan lokal tersebut juga dapat ditempatkan kembali dalam kehidupan masyarakat sebagai sebuah model atau cara untuk mencegah konflik terjadi di masyarakat dan sebagai strategi untuk membangun perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Proses penyelesaian konflik antar desa, penting mengedepankan keterlibatan perempuan, bukan hanya untuk kepentingan penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian responsif gender, tetapi juga untuk pemenuhan kepentingan perempuan dalam melancarkan upaya perdamaian.

Pemetaan posisi dan peran perempuan juga dapat dihubungkan dengan konteks fase perkembangan konfliknya, yakni pra konflik, konflik dan post konflik. Pelibatan dan peran perempuan dalam upaya mediasi konflik diharapkan konflik dapat cepat teratasi dan memiliki perspektif yang berkeadilan gender. Setiap fase dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik masing-masing memiliki tekanan khas berkaitan dengan peran perempuan sebagai mediator konflik. Posisi dan kontribusi perempuan pada setiap fase konflik akan sangat berkaitan dengan karakter setiap fase tersebut. Pada *fase pra konflik*, kapasitas perempuan sebagai penghubung dan sensitif terhadap ancaman destruksi kemanusiaan dapat menjadi sumbangan penting dan strategis untuk peringatan dan respons dini. Pada fase ini perempuan perlu pengetahuan dan keterampilan dalam hal deteksi dini atau *early warning system* konflik sosial. Pengenalan yang mendalam soal konflik oleh perempuan akan memudahkan untuk mencegah dan menghentikan kekerasan yang mungkin saja timbul sejak awal konflik. Kemudian pada *fase konflik*, kapasitas perempuan dikaitkan dengan upaya – upaya resolusi dan transformasi konflik atau upaya mempertahankan perdamaian berkelanjutan. Fase ini pula perempuan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang teknik mediasi atau negosiasi dalam penyelesaian konflik. Sebagai negosiator, perempuan memiliki pengalaman kemampuan untuk mendengarkan, mengamati, dan tidak hanya menghakimi mereka yang terdampak konflik Selanjutnya pada *fase post konflik*, peran perempuan diarahkan untuk mendukung proses *recovery* dan *healing* melalui aktivitas pemberdayaan sosial seperti ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Perempuan dapat dan mampu membangun interaksi sosial untuk mewujudkan aksi atau Tindakan Bersama yang akan mengembangkan sumber daya komunitasnya untuk menciptakan perdamaian. Perempuan diharapkan bisa membangun relasi

dan melancarkan strategi membangun interaksi sosial satu sama lain untuk saling melengkapi kapasitas masyarakat yang memiliki satu kepentingan atau tujuan bersama.

4. KESIMPULAN

Pelibatan perempuan sebagai mediator konflik dalam proses resolusi konflik diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang berperspektif gender dan mempercepat proses perdamaian. Penyelesaian konflik harus diawali dengan pemahaman yang mendalam tentang konflik oleh perempuan, meskipun kenyataannya, partisipasi perempuan dalam proses resolusi konflik masih terbatas, sehingga akan menghasilkan kebijakan gender yang bias dan tidak berpihak pada kepentingan perempuan.

Pengakuan

Artikel dibuat berdasarkan pengembangan hasil penelitian yang bersumber dari dana DIPA yang dialokasikan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako pada tahun 2021. Hasil penelitian ini dikembangkan dan diolah untuk diajukan dalam kegiatan konferensi Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) di tahun 2022.

REFERENSI

- Birgit Blaucher. 2017. *Dimensi Budaya dalam Perdamaian*. Penerbit Ombak; Jakarta
- BNPT. 2018. *Memelihara Kearifan Mencegah Radikalisma*. CV.Mutiara Barokah Multigrafika; Jakarta.
- Ichhan Malik. 2017. *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*, Kompas Media Nusantara; Jakarta
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group; Jakarta.
- Kemen PPPA RI. 2017. *Pentingnya Peran Perempuan sebagai Penjaga Perdamaian dan Juru Runding Dalam Memerangi Konflik Ketegangan Sosial*.
- Safithri, Ritha dan Ahmad Sinala. 2021. *Revitalisasi Budaya Masyarakat dalam Upaya Mencegah Konflik Antar Desa di Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi*. (Laporan Penelitian, Universitas Tadulako).